1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Inflasi Provinsi Kalimantan pada triwulan II tahun 2026, pada bulan Juni 2026 secara year on year tercatat sebesar 3,30 persen. Sementara secara year to date/tahun kalender tercatat sebesar 1,90 persen. Sepanjang triwulan 1 tahun 2026 secara berturut-turut dari April hingga Juni tahun 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,02 persen, 0,27 persen, dan 0,45 persen.

   10 komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi year on year Juni 2026, antara lain emas perhiasan, tarif air minum PAM, cabai rawit, tarif angkutan udara, beras, tarif rumah sakit, bawang merah, tomat, daging ayam ras, nasi dengan lauk, bensin, sepeda motor, air kemasan, minyak goreng, bakso siap santap, kue basah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), sewa rumah, krim wajah, dan panci. Sementara itu, 10 komoditas yang memberikan andil deflasi secara year on year Juni 2026 antara lain ikan layang/ ikan benggol, bawang putih, telur ayam ras, kangkung, tarif angkutan laut, sabun detergen bubuk, pengharum cucian/ pelembut, daun bawang, udang basah, pembersih lantai, jagung manis, daun kemangi, susu bubuk untuk balita, sabun mandi, dan terong.

   Beberapa risiko kenaikan inflasi Provinsi Kalimantan Utara yang perlu diwaspadai pada triwulan III tahun 2026 mendatang diantaranya adalah kenaikan harga komoditas administered price khususnya bahan bakar minyak dan LPG sebagai dampak perkembangan geopolitik dunia, kenaikan harga emas dunia, dan potensi musim kemarau/kekeringan yang terjadi di daerah penghasil komoditas.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Secara historis, inflasi Kalimantan Utara terbagi menjadi 2 (dua) siklus yaitu siklus inflasi dan siklus deflasi. Siklus inflasi biasanya terjadi pada momen hari besar keagamaan nasional seperti Idulfitri, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru yang disebabkan karena meningkatnya permintaan, serta ketika ada kebijakan kenaikan harga komoditas administered price. Sementara, siklus deflasi biasanya terjadi ketika terjadi kelebihan pasokan barang di pasar dan adanya kebijakan penurunan harga komoditas administered price oleh pemerintah.

   Berdasarkan karakteristiknya, inflasi kelompok administered price bergantung pada shock dan kebijakan pemerintah pusat/daerah dan tercatat selalu berada di atas indeks harga konsumen (IHK). Sementara itu, inflasi inti/core tercatat mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Sedangkan inflasi volatile food (VF) terjaga pada level rendah dan stabil.

   Berdasarkan identifikasi, terdapat beberapa permasalahan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut.

   1. Dari sisi keterjangkauan harga diketahui bahwa mayoritas komoditas pangan harganya tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)/Harga Acuan Penjualan (HAP), perbedaan pola distribusi dan faktor geografis menyebabkan tingginya disparitas harga antar daerah, serta potensi kecurangan pasar/persaingan tidak sehat seperti monopoli dan oligopoli menyebabkan level harga yang tinggi.
   2. Dari sisi ketersediaan pasokan diketahui bahwa rendahnya produksi komoditas pangan

lokal masih menjadi permasalahan utama sehingga pasokan sangat bergantung dari luar daerah. Selain itu, penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berusaha di sektor tersebut sehingga menghambat upaya peningkatan produksi pangan lokal.

3. Dari sisi kelancaran distribusi diketahui bahwa keterbatasan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, dan pelabuhan), faktor cuaca, mahalnya tarif bongkar muat, panjangnya rantai distribusi pangan, dan rendahnya realisasi kerja sama antar daerah masih menjadi permasalahan utama yang menghambat kelancaran distribusi barang.
4. Dari sisi komunikasi yang efektif diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi saat ini belum optimal dan belum menyasar pada permasalahan di lapangan. Oleh karena itu perlu ada sinergi upaya pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan melalui strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Strategi tersebut kemudian dijabarkan melalui rencana aksi/program kerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/588/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2027.

Sepanjang triwulan II tahun 2026 telah dilakukan beberapa upaya pengendalian inflasi sebagai berikut.

1. Pemantauan harga dan stok pada tanggal 6 April 2026 di pasar Induk Tanjung selor.
2. Melaksanakan rapat rutin pengendalian inflasi daerah mingguan.
3. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah pada tanggal 10 Juni di Lapangan Agathis Tanjung Selor.
4. Melaksanakan penjajagan Kerjasama Antar Daerah dengan Kabupaten Berau pada tanggal 12 Mei 2026.
5. Melaksanakan pemberian bantuan transportasi melalui APBDuntuk kegiatan Mudik Gratis Tahun 2026.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka memastikan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi daerah perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara triwulan II Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kegiatan sidak pasar masih minim dilakukan.
2. Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan masih sebatas MoU dan belum menyentuh pada kerja sama tukar menukar komoditas antar daerah.
3. Panjangnya rantai distribusi pangan dari daerah penghasil dan tinginya biaya distribui menyebabkan banyaknya komoditas bahan pokok yang melebihi HET/HAP.
4. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan masih sangat terbatas dan belum merata seiring dengan keterbatasan anggaran sehingga belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga barang. Oleh karenanya perlu didirikan Kios pangan sebagai salah satu instrumen penyeimbang harga.

Meskipun data produksi cabai rawit merah Kaltara surplus tetapi secara harga pada

5. momen tertentu harganya mengalami lonjakan jauh di atas HET. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah sinergis untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
6. Belum padunya pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi antara pusat dan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat direkomendasikan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pemantauan dan sidak secara rutin dalam rangka pengendalian harga dan pasokan barang.
2. Perlu dilakukan kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil agar Kaltara memperoleh pasokan dengan harga yang lebih rendah.
3. Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur konektivitas serta pengaturan tarif bongkar muat agar tata kelola distribusi barang semakin efisien.
4. Perlu didirikan kios pangan TPID sebagai salah satu instrumen penyeimbang harga dan alternatif pembiayaan pelaksanaan pasar murah melalui pendanaan non APBD.
5. Perlu dilakukan peningkatan produksi komoditas pertanian dalam rangka mencapai swasembada pangan dan pencanangan gerakan menanam.
6. Perlu adanya perbaikan tata niaga dalam rangka pengendalian harga cabai rawit merah.
7. Perlunya peningkatan sinergi dalam pengendalian inflasi daerah.